

BAB II

MENELAAH ANIME *ONE PIECE* DAN ISU ISU DI DALAMNYA

Pada Bab ini akan dijelaskan bagaimana media populer khususnya film dan anime dapat merepresentasikan dinamika politik global yang kompleks. Untuk memberikan dasar pemahaman yang menyeluruh, pembahasan dimulai dengan menelusuri keterkaitan antara film dan politik sebagai media representasi kekuasaan, ideologi, dan konflik internasional. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana politik internasional dan konsep kekuasaan digambarkan dalam studi hubungan internasional, lalu diterapkan pada anime *One Piece*. Dengan menelaah hal ini, penulis ingin menunjukkan bahwa *One Piece* tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga menyiratkan pesan-pesan politik yang mencerminkan realitas global.

2.1 Politik Global dalam Film

2.1.1 Representasi Kekuasaan dan Kekuasaan Politik

Film sering kali membahas masalah kekuasaan, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan, dengan menggambarkan dinamika kekuasaan melalui beragam karakter dan narasi yang mengeksplorasi interaksinya dengan sifat-sifat manusia.⁴¹ Serial-serial televisi seperti *House*

⁴¹ Jesika Anastasia, et al. 2024. *Analisis Penokohan Hans Landa Sebagai Tokoh Antagonis Dalam Film *Inglourious Basterds**. Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian, Edisi 10.2.

of Cards dan *The West Wing* adalah contoh yang sangat terkenal dalam menggambarkan intrik politik dalam pemerintahan. *House of Cards* menampilkan Frank Underwood, seorang politisi ambisius yang menggunakan manipulasi, taktik licik, dan kekerasan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.⁴² Serial ini menunjukkan bahwa kekuasaan dapat merusak moral, sering kali menimbulkan dilema etis dan dorongan untuk melanggar aturan demi tujuan pribadi. Sebaliknya, *The West Wing* menawarkan perspektif yang lebih idealis tentang politik, menggambarkan para politisi yang berjuang untuk membuat pilihan yang etis dan bertanggung jawab, dengan Presiden Bartlet dan stafnya yang berkomitmen untuk pelayanan publik.⁴³ Meskipun menghadapi intrik dan ketegangan politik, serial ini menekankan moralitas, tanggung jawab, dan beban yang dihadapi oleh pemimpin yang berusaha untuk melayani kebaikan yang lebih besar.

Kedua serial ini menunjukkan bagaimana kekuasaan sering kali menimbulkan konflik, tidak hanya antara individu, tetapi juga antara berbagai tokoh yang terlibat. Karakter-karakter dalam *House of Cards* seperti Frank Underwood, misalnya, memiliki ambisi besar untuk meraih posisi teratas dalam pemerintahan dan bersedia mengorbankan etika pribadi untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, *The West Wing* menggambarkan

⁴² Innocentius Gerardo Mayolla. 2021. *Kualifikasi Penguasa Ideal Telaah Filsafat Politik Machievelli Terhadap Tokoh Frank Underwood dalam Serial TV House of Cards*. Forum. Vol. 50. No. 1. 2021.

⁴³ John Street. 2016. *Budaya Populer Dan Komunikasi Politik*. Handbook Komunikasi Politik. Halaman 127.

konflik internal yang terjadi ketika para politisi berusaha menyeimbangkan ambisi pribadi dengan kewajiban mereka terhadap masyarakat. Konflik ini mencerminkan bahwa kekuasaan dapat berpotensi berbahaya jika tidak digunakan dengan bijaksana, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang menguntungkan apabila diarahkan pada pencapaian kebaikan bersama, seperti keadilan atau reformasi sosial. Salah satu keutamaan dari film dan serial politik adalah kemampuannya mengekspos sisi manusiawi dari para politisi dan individu yang memegang posisi otoritas. Film semacam ini membantu penonton memahami bahwa di balik keputusan politik yang krusial, ada individu dengan perasaan, kecemasan, dan impian pribadi, yang membuat mereka jauh dari kesempurnaan.

Politik internasional, seperti yang digambarkan dalam film dan serial televisi, adalah arena yang sangat kompleks di mana negara-negara, aktor non-negara, dan individu-individu yang memiliki posisi otoritas saling berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka.⁴⁴ Meskipun film sering kali menyederhanakan atau memperbesar dinamika kekuasaan demi kepentingan hiburan, kenyataannya politik internasional jauh lebih rumit dan penuh ketegangan. Politik internasional melibatkan beragam faktor, mulai dari kepentingan nasional yang berbeda, aliansi internasional, hingga perubahan dalam tatanan global yang lebih luas.

⁴⁴ Dina Kusumayanti, Khoirun Nisaatul Mukharomah, Eulalia Czesarina Wijayanti, Rika Andriaka, dan Siti Atiqahgania Sasli. 2022. *Analisis Aspek-Aspek Hegemoni Dan Dominasi Sosial Ekonomi Dalam Serial 'Squid Game'*. Jurnal Entitas Sosiologi, Edisi 11.2. Halaman 135-152.

Politik internasional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, politik internasional dapat dilihat melalui lensa keamanan internasional. Dalam dimensi ini, negara-negara berusaha menjaga stabilitas, melindungi kedaulatan, dan memastikan keamanan dalam menghadapi ancaman eksternal, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Keamanan internasional mencakup isu-isu seperti peperangan antarnegara, proliferasi senjata nuklir, serta ancaman terorisme global.⁴⁵ Negara-negara sering membentuk aliansi militer atau organisasi internasional untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mencegah eskalasi konflik. Sebagai contoh, NATO adalah aliansi yang bertujuan untuk mempertahankan keamanan negara-negara anggotanya, sementara perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) berfungsi untuk mencegah penyebaran senjata nuklir di seluruh dunia.

Kedua, politik internasional juga dapat dipahami dalam kerangka kerjasama ekonomi global. Ekonomi internasional adalah bagian penting dalam hubungan antarnegara, di mana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan, investasi, dan bantuan pembangunan. Organisasi seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam mengatur hubungan ekonomi antarnegara dan memberikan bantuan untuk negara-negara yang

⁴⁵ Fadhil Alghifari, and Raja Nathania Olga Letticia. 2016. *Analisis Teori Offense-Defense Pada Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur*. Global: Jurnal Politik Internasional, Edisi 18.1. Halaman 18-33.

mengalami kesulitan ekonomi. Negara-negara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan keuntungan mereka sendiri, tetapi juga seringkali harus mempertimbangkan kesejahteraan global, seperti dalam kasus perubahan iklim atau ketahanan pangan yang memerlukan kolaborasi lintas batas.⁴⁶

Selanjutnya, politik internasional dalam dimensi sosial dan budaya juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas global. Dimana negara-negara harus mempertimbangkan nilai-nilai bersama, hak asasi manusia, dan solidaritas internasional dalam merespons masalah seperti migrasi, perlindungan pengungsi, dan penyebaran ideologi radikal. Sering kali, masalah-masalah ini dapat memicu ketegangan di antara negara-negara, karena mereka harus menyeimbangkan antara melindungi kepentingan domestik dengan kewajiban internasional mereka.⁴⁷ Dalam banyak kasus, diplomasi menjadi sarana utama untuk menangani isu-isu ini, melalui dialog antarnegara, forum internasional seperti PBB, serta kerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu sosial dan kemanusiaan.

Dimensi politik internasional berbasis ideologi juga tidak kalah penting. Negara-negara sering kali terlibat dalam persaingan ideologis, di mana mereka berusaha mempengaruhi negara lain agar menganut sistem

⁴⁶ Hino Samuel Jose dan Indah Pratiwi Eri Putri. 2021. *Tatanan Global Pada Pembangunan Dan Ekonomi Politik Internasional Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa, Edisi 5.1. Halaman 46-70.

⁴⁷ Taqy Fauzan Giyandri dan Jona Bungaran Basuki Sinaga. 2024. *Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Edisi 4.3. Halaman 371-378.

politik, ekonomi, atau sosial yang mereka anggap paling sesuai. Contoh klasiknya adalah Perang Dingin, di mana blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhadapan dengan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, masing-masing dengan ideologi kapitalisme dan komunisme.⁴⁸ Hingga kini, perbedaan ideologi ini masih tercermin dalam hubungan internasional, baik dalam bentuk kebijakan luar negeri yang mendukung demokrasi dan kebebasan pasar atau, sebaliknya, dukungan terhadap pemerintahan otoriter.

Selain itu, politik internasional pada isu lingkungan hidup semakin menjadi isu penting. Perubahan iklim, krisis air, dan degradasi lingkungan adalah tantangan global yang memerlukan kerjasama internasional. Negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara maju dan berkembang, sering kali terlibat dalam negosiasi untuk menetapkan kebijakan lingkungan global yang adil dan berkelanjutan.⁴⁹ Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris adalah contoh nyata dari upaya internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim, yang tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi pada seluruh planet. Dalam hal ini, politik internasional berfokus pada penciptaan norma bersama yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama mengatasi tantangan bersama. Politik internasional mencakup berbagai dimensi yang

⁴⁸ Yuni Arfina. 2023. *Tantangan Globalisasi Terhadap Keberagaman Budaya: Suatu Pendekatan Sosio-Politik*. Literacy notes 1.2.

⁴⁹ Pramesti Cahyani Hedhi Ningsih. 2019. *Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement*. Insignia: Journal of International Relations, Edisi 6.2. Halaman 83-93.

mencerminkan keragaman kepentingan dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Setiap negara, dengan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya, berusaha untuk mempengaruhi tatanan dunia yang lebih besar sesuai dengan tujuan nasional mereka.

2.1.2 Penggambaran Ideologi dan Konflik Sosial

Film sering kali menjadi alat yang ampuh untuk mengeksplorasi dan menggambarkan beragam ideologi dan masalah sosial di masyarakat. Film dapat merefleksikan tantangan kelompok tertentu serta dampak kebijakan politik terhadap kehidupan individu dan masyarakat dengan menggunakan plot yang kuat, karakter yang mendalam, dan latar yang relevan.⁵⁰ Film dapat merefleksikan realitas masyarakat, menunjukkan pengaruh dinamika kekuasaan dan kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari. Film-film tertentu secara jelas mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan konflik kelas, rasisme, dan gender, sehingga memudahkan pemahaman penonton akan dinamika rumit yang ada di masyarakat.

Contoh Film yang Menggambarkan Konflik Sosial seperti *Selma* (2014) dimana film ini mengisahkan tantangan gerakan hak-hak sipil Amerika, dengan fokus pada demonstrasi Martin Luther King Jr. dari Selma ke Montgomery pada tahun 1965.⁵¹ *Selma* menekankan kesulitan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para aktivis hak-hak sipil dalam upaya

⁵⁰ Imsar, and Ahmad Husaini. 2023. *Ekonomi Politik Media dalam Perspektif Komunikasi dan Sosial-Budaya*. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal 2.2. Halaman 317-324.

⁵¹ Yudhisti Eko Prasetyo. 2014. *TA: Film Dokumenter Tarian Reog Bulkio*. Diss. STIKOM Surabaya.

mereka untuk mendapatkan hak suara bagi warga kulit hitam, serta konsekuensi dari undang-undang diskriminatif yang berlaku pada saat itu. Selain itu film *The Help* (2011) yang menceritakan kehidupan tiga wanita di Mississippi selama tahun 1960-an yang terdiri dari dua pembantu Afrika-Amerika dan seorang penulis kulit putih. *The Help* menekankan diskriminasi rasial para pembantu, serta ketabahan mereka dalam berbicara dan menceritakan kisah mereka. Film ini mendorong penonton untuk berpikir tentang ketabahan dan ketangguhan mereka sendiri dalam menghadapi keadaan yang menindas.⁵²

Film dapat menunjukkan berbagai ide dan konflik sosial, membantu orang belajar tentang isu-isu yang sering diabaikan atau tidak sepenuhnya dipahami. Dengan mengeksplorasi cerita yang mendetail dan karakter yang menarik, penonton dapat melihat dampak nyata dari ketidakadilan dalam masyarakat dari dekat. Film-film yang membahas tema-tema ini tidak hanya menyenangkan untuk ditonton, tetapi juga memberikan banyak wawasan tentang situasi sosial saat ini. Film-film ini dapat memulai percakapan, memotivasi orang untuk mengambil tindakan, dan menyoroti betapa pentingnya keadilan dan kesetaraan di berbagai bidang kehidupan.

Film benar-benar dapat membantu kita melihat berbagai ide dan masalah sosial, dan film memiliki kemampuan untuk mengubah cara berpikir orang. Film benar-benar dapat menunjukkan kepada kita

⁵² Tom McClelland. 2011. *The Philosophy of Film and Film as Philosophy*.

kompleksitas isu-isu sosial dan politik yang penting melalui penggambaran yang kuat dan kisah-kisah yang emosional, yang menginspirasi penonton untuk mengambil tindakan demi perubahan yang positif.⁵³ Film tidak hanya untuk bersenang-senang, film juga memainkan peran penting dalam mengadvokasi keadilan dan hak asasi manusia.

2.1.3 Film Sebagai Alat Propaganda

Sepanjang sejarah, film telah berfungsi sebagai alat propaganda, yang secara efektif mempromosikan ideologi dan memengaruhi persepsi publik.⁵⁴ Di dunia saat ini, khususnya di abad ke-21, film tidak hanya berfungsi sebagai sumber hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan politik, membentuk opini publik, dan menyoroti isu-isu sosial. Film dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat dan membentuk narasi politik. Film dapat digunakan sebagai propaganda dengan berbagai cara:

1. Meningkatkan Kesadaran Sosial: Film dapat digunakan untuk mengajarkan orang-orang tentang masalah sosial yang kritis termasuk konflik, hak asasi manusia, dan perubahan iklim.
2. Mempromosikan Ideologi: Film dapat mempromosikan ideologi tertentu, mendukung program pemerintah, atau memproyeksikan citra positif suatu negara atau organisasi.

⁵³ Daniel Purwoko Budi Susetyo. 2021. *Dinamika Kelompok: Pendekatan Psikologi Sosial*. SCU Knowledge Media.

⁵⁴ Andi Youna Bachtiar, Didin Hikmah Perkasa, dan Mochamad Rizki Sadikun. *Peran Media Dalam Propaganda*. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13.2.

3. Menyampaikan Pesan Emosional: Dengan menceritakan kisah-kisah yang sarat emosi, film dapat memengaruhi cara pandang penonton terhadap topik tertentu.

Contoh Film sebagai alat propaganda :

1. “American Sniper,” yang disutradarai oleh Clint Eastwood, adalah film yang didasarkan pada otobiografi Chris Kyle, yang bertugas sebagai penembak jitu Angkatan Laut Amerika Serikat. Film ini dipandang sebagai bentuk propaganda karena sejumlah alasan. Film ini menggambarkan Chris Kyle sebagai pahlawan yang berdedikasi untuk membela negaranya, yang berkontribusi pada persepsi yang baik terhadap militer AS.⁵⁵ Orang sering berpikir bahwa menyoroti pengorbanan dan keberanian Kyle membantu meningkatkan dukungan publik terhadap militer. Musuh dalam film ini ditampilkan dalam sudut pandang yang sangat negatif, terutama mengenai perang di Irak. Hal ini tampak seperti cara untuk membenarkan keterlibatan AS dalam konflik tersebut dengan menunjukkan para pejuang ISIS dan musuh-musuh lainnya sebagai bukan manusia. Film ini mencoba untuk menciptakan rasa patriotisme pada penonton dengan berbagi cerita yang personal dan emosional. Aspek emosional, seperti trauma yang dialami Kyle dan pengorbanan yang dilakukan oleh

⁵⁵ Nur Ajijah. 2015. *Analisis Semiotik Propaganda Perang Amerika-Irak Dalam Film American Sniper*.

keluarganya, bertujuan untuk menciptakan hubungan bagi penonton dengan tema nasionalisme dan dukungan bagi para tentara.

2. “Red Dawn,” yang didasarkan pada film tahun 1984 dengan judul yang sama, adalah tentang Korea Utara yang menginvasi Amerika. Karena takut akan ancaman asing, film ini membuat seolah-olah ada kekuatan asing yang menyerang Amerika Serikat.⁵⁶ Fokus pada serangan dan perlawanan warga sipil terhadap penyerang dimaksudkan untuk membuat orang lebih waspada dan takut akan ancaman dari negara lain dan untuk memicu keinginan yang kuat untuk melindungi negara. Seperti “American Sniper”, “Red Dawn” menunjukkan sekelompok remaja yang melawan invasi dengan mengangkat senjata, yang membuat perlawanan tampak heroik. Hal ini membantu menyebarkan gagasan bahwa orang biasa harus melindungi negara mereka, yang membuat penonton merasa terhubung dengan cerita. Film ini memperkuat identitas dan kebanggaan nasional dengan menunjukkan betapa kerasnya orang-orang di Amerika Serikat harus bekerja dan betapa beraninya mereka saat diserang. Inti dari cerita film ini adalah gagasan bahwa Amerika

⁵⁶ Teddy Maradona. 2016. *Analisis Isi Pesan Provokatif Dalam Film Buatan Amerika Serikat Tentang Korea Utara. (Analisis hermeneutika pada Film “The Interview dan Red Dawn”)*.

perlu bekerja sama untuk melawan bahaya, tidak peduli seberapa sulitnya keadaan.

Baik “American Sniper” maupun “Red Dawn” menggunakan cerita dan emosi untuk mengirimkan pesan propaganda yang mendukung militer dan memperkuat identitas nasional. Dengan cara ini, kedua film tersebut tidak hanya menyenangkan untuk ditonton, tetapi juga digunakan untuk mengubah pikiran orang dan mendukung gagasan tentang nasionalisme dan militerisme.

Film-film yang disebutkan di atas menggambarkan bagaimana sinema dapat secara efektif mengkomunikasikan pesan-pesan politik dan mempengaruhi opini publik. Melalui resonansi visual dan emosional, film dapat meningkatkan pengetahuan publik tentang topik-topik penting dan membentuk perspektif tentang kebijakan pemerintah atau ideologi tertentu.

Film dapat memfasilitasi pemahaman penonton tentang topik-topik yang rumit seperti peperangan, terorisme, dan hak asasi manusia, sehingga mendorong kesadaran dan keterlibatan yang lebih besar.⁵⁷ Banyak film perang dan militer yang meningkatkan patriotisme dan dukungan bagi para prajurit, menumbuhkan persepsi yang baik tentang bangsa dan prinsip-prinsipnya. Film berfungsi sebagai alat propaganda yang ampuh, yang

⁵⁷ Sukawarsini Djelantik, et al. 2015. *Komunikasi internasional dalam era informasi dan perubahan sosial di Indonesia.* "Research Report-Humanities and Social Science 2.

sangat mempengaruhi opini publik dan membangun narasi politik.⁵⁸ Contoh-contoh film menunjukkan bagaimana film dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi, meningkatkan kesadaran sosial, dan membentuk persepsi publik tentang topik-topik penting. Meskipun film memiliki kapasitas untuk mengajar dan menginspirasi, penting bagi penonton untuk mempertahankan perspektif kritis dan mengenali potensi manipulasi yang terdapat dalam informasi yang diberikan.

Film menggambarkan dan menganalisis aspek-aspek politik dalam masyarakat dengan menggunakan berbagai media.⁵⁹ Dari penggambaran kekuasaan hingga kritik terhadap sistem politik, film memberikan wawasan yang mendalam dan dapat mendorong pemikiran kritis penontonnya. Film, dengan potensinya untuk membangkitkan emosi dan menyampaikan pesan yang kuat, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai cerminan realitas politik dan sosial kita saat ini. Sebagai hasilnya, film memiliki kekuatan untuk menginspirasi perubahan dan meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah sosial yang krusial.

⁵⁸ M. Elfan Kaukab, dan Atinia Hidayah. 2020. *Strategi Komunikasi Politik Amerika Serikat dalam Memanfaatkan Hollywood sebagai Media untuk Memperkuat Dominasi Global*. Resolusi: Jurnal Sosial Politik 3.2. Halaman 89-97.

⁵⁹ Oemardi, Farihah. 2024. *Nilai Budaya Dalam Film Mencuri Reden Saleh Karya Husein M. Atmodjo Saleh*. Seminar & Conference Proceedings of UMT.

2.2 Politik Internasional dan Kekuasaan Dalam Hubungan Internasional

Politik internasional memiliki peran utama dalam mengatur interaksi antara negara-negara dan aktor-aktor non-negara di seluruh dunia.⁶⁰ Secara umum, istilah ini merujuk pada dinamika kekuasaan, pengambilan keputusan, serta kebijakan yang diberlakukan di tingkat global oleh negara-negara berdaulat dan aktor lainnya, seperti organisasi internasional serta perusahaan multinasional. Sementara itu, hubungan internasional merupakan studi yang lebih luas tentang bagaimana negara dan aktor non-negara tersebut berinteraksi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.⁶¹ Politik internasional menjadi sangat penting karena menentukan aturan, norma, serta mekanisme interaksi dalam hubungan internasional. Terdapat empat poin utama yang dipilih berdasarkan indikator fundamental dalam studi hubungan internasional yang paling sering direpresentasikan dalam budaya populer, khususnya dalam *anime One Piece*. Keempat poin tersebut, yakni kestabilan dan keamanan internasional, tata kelola global, tantangan global bersama, serta aliansi dan kepentingan nasional, yang mencerminkan kerangka utama peran negara dalam sistem internasional. Pemilihan keempat poin ini karena memiliki kesesuaian tinggi dengan narasi yang muncul dalam *anime One Piece*, terutama dalam menggambarkan dinamika kekuasaan, konflik, dan

⁶⁰ Iskandar Hamonangan. 2020. *Pasar, Tata Kelola Dan Hubungan Transnasional Di Era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia*. Jurnal Ketahanan Nasional edisi 26.1. Halaman 55-70.

⁶¹ Ani Widayanti Soetjipto, et al. 2019. *Transnasionalisme: peran aktor non negara dalam hubungan internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

diplomasi. Dengan membatasi pada empat poin ini, analisis bisa dilakukan lebih fokus dan mendalam, tanpa mengorbankan representasi isu-isu kunci dalam hubungan internasional. Berikut adalah pembahasan mengenai peran politik internasional dan kekuasaan dalam Hubungan Internasional serta bagaimana keempat elemen ini mempengaruhi berbagai aspek interaksi global.

2.2.1 Menjaga Kestabilan dan Keamanan Internasional

Politik internasional memiliki peran fundamental sebagai landasan utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan global. Stabilitas dalam hubungan internasional mengacu pada terciptanya kondisi yang minim ketegangan dan konflik, baik di tingkat regional maupun global, sehingga memungkinkan tercapainya keseimbangan yang berkelanjutan di antara kepentingan negara-negara.⁶² Dalam artian negara-negara menjadi aktor sentral yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, serta kestabilan domestik yang berimplikasi pada situasi internasional.

Karena sistem internasional bersifat anarkis yang berarti tidak adanya otoritas pusat atau pemerintahan global yang dapat mengatur interaksi antarnegara, dinamika politik internasional sering kali ditandai

⁶² Kaslam. 2024. *Terusan Suez sebagai Pilar Geopolitik dan Ekonomi Mesir di Kancah Internasional*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Edisi 26(2).

oleh ketidakpastian dan potensi konflik.⁶³ Dalam situasi tersebut, negara-negara cenderung mengandalkan kekuatan nasional, terutama melalui kekuatan militer dan aliansi strategis, sebagai instrumen utama untuk melindungi kepentingan mereka. Sebagai contoh, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok memanfaatkan kekuatan militer mereka tidak hanya untuk mempertahankan kepentingan nasional tetapi juga untuk bertindak sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan tertentu, guna mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam kestabilan regional maupun global.

Selain mengandalkan kemampuan militer secara individu, kolaborasi antarnegara melalui pembentukan aliansi militer telah menjadi strategi penting dalam memitigasi ketidakstabilan global. NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) adalah contoh nyata dari bagaimana aliansi militer dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pertahanan bersama, tetapi juga sebagai alat politik yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa setelah Perang Dunia II. Dengan menciptakan sistem kolektif keamanan yang efektif, NATO telah berkontribusi terhadap stabilisasi kawasan melalui upaya pencegahan konflik, tanggapan terhadap ancaman global, serta pelaksanaan misi internasional yang mendukung

⁶³ Hino Samuel Jose, and Indah Pratiwi Eri Putri. 2021. *Tatanan Global Pada Pembangunan Dan Ekonomi Politik Internasional Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa Edisi 5.1. Halaman 46-70.

perdamaian. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga kestabilan melalui pendekatan kolektif dan terkoordinasi.

Di sisi lain, peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga kestabilan melalui operasi penjaga perdamaian juga menjadi sorotan penting dalam politik internasional.⁶⁴ Misi penjaga perdamaian PBB, yang sering kali dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan konflik seperti Afrika dan Timur Tengah, dirancang untuk meredam eskalasi konflik, mendorong rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan kembali pascakonflik. Operasi ini menyoroti peran organisasi internasional sebagai aktor supranasional yang memiliki mandat untuk menjaga ketertiban dunia dan mendorong terciptanya tatanan global yang stabil.

Tidak hanya itu, politik internasional juga memainkan peran dalam menciptakan mekanisme dialog dan negosiasi yang bertujuan mencegah konflik serta mengurangi ketegangan antarnegara. Forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan PBB menjadi wadah untuk membahas isu-isu keamanan serta mengembangkan langkah-langkah preventif yang dapat mendukung kestabilan global.⁶⁵ Dialog semacam ini memungkinkan negara-negara untuk membangun saling pengertian,

⁶⁴ Yogi Priastanto, Agus Subagyo, & Yohanes Sulaiman. 2024. *Operasi Perdamaian Kompi Zeni Kontingen Garuda Dalam Resolusi Konflik Di Republik Demokratik Kongo (Studi Kasus Pembangunan Wilayah Provinsi Beni)*. Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, Edisi 1(1).

⁶⁵ Arief Setiawan, dan Asih Purwanti. 2024. *Keamanan Insani dan Politik Global*. Universitas Brawijaya Press.

menyelaraskan kepentingan, dan menciptakan solusi bersama yang berorientasi pada perdamaian jangka panjang.

Dalam menjaga kestabilan dan keamanan internasional, aspek diplomasi juga menjadi komponen kunci yang tidak dapat diabaikan. Diplomasi, sebagai seni bernegosiasi dalam hubungan antarnegara, memungkinkan terciptanya resolusi konflik tanpa harus mengandalkan kekuatan militer.⁶⁶ Melalui pendekatan ini, negara-negara dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, sekaligus meminimalkan risiko eskalasi yang dapat mengancam kestabilan regional maupun global.

Menjaga kestabilan dalam hubungan internasional merupakan proses yang kompleks dan multidimensional.⁶⁷ Politik internasional menyediakan kerangka bagi negara-negara untuk berkolaborasi, bernegosiasi, dan bertindak secara kolektif guna menciptakan keamanan global yang berkelanjutan. Aliansi militer, operasi penjaga perdamaian, mekanisme dialog, serta pendekatan diplomasi adalah beberapa elemen penting yang berkontribusi pada terciptanya stabilitas. Dalam dunia yang semakin saling terhubung dan dinamis, kerja sama internasional yang efektif tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan di tatanan global.

⁶⁶ Melyana R Pugu. 2024. *Diplomasi dan Negosiasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁶⁷ Donny Widiyanto, dan Evita Isretno Israhadi. 2024. Penafsiran Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Ketatanegaraan Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Edisi 4.2. Halaman 8403-8412.

2.2.2 Menciptakan dan Menegakkan Tata Kelola Global

Untuk mencapai tujuan bersama dalam skala global, pemerintah dan aktor-aktor internasional bekerja sama dalam kerangka kerja yang dikenal sebagai tata kelola global. Tata kelola global merupakan mekanisme kolektif yang dirancang untuk menciptakan stabilitas, ketertiban, dan keamanan dalam hubungan internasional melalui perumusan aturan, penerapan kebijakan, serta penguatan kolaborasi lintas negara. Dengan adanya tata kelola global, sistem internasional yang bersifat anarkis dapat diimbangi melalui mekanisme yang memberikan arah, pengawasan, dan solusi terhadap isu-isu lintas batas.⁶⁸

Negara-negara didorong untuk berkolaborasi secara aktif guna menetapkan norma-norma, menciptakan kerangka hukum, dan membangun sistem yang dapat menopang stabilitas jangka panjang. Dalam hal ini, berbagai aktor—termasuk negara, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan sektor swasta—berkontribusi pada pembentukan tata kelola global. Proses ini melibatkan negosiasi intensif, konsensus multilateral, serta komitmen untuk mencapai tujuan bersama yang sering kali mencakup isu-isu yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

Sebagai contoh, dalam menangani perubahan iklim, negara-negara telah menunjukkan komitmen mereka melalui perjanjian internasional

⁶⁸ Muhammad Abas, et al. 2023. *Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara*.

seperti *Paris Agreement*.⁶⁹ Perjanjian ini tidak hanya menetapkan target penurunan emisi karbon tetapi juga mempromosikan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya global untuk melindungi lingkungan. Kesepakatan semacam ini mencerminkan pentingnya kerja sama internasional dalam membangun tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan sekaligus menunjukkan komitmen bersama terhadap tujuan jangka panjang yang melampaui kepentingan nasional.

Tata kelola global tidak hanya menitikberatkan pada pembentukan norma-norma baru tetapi juga pada penegakan dan pengawasan terhadap kesepakatan yang sudah ada.⁷⁰ Penegakan ini menjadi elemen penting untuk menjaga kestabilan dalam sistem internasional yang kompleks dan saling terhubung. Badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dana Moneter Internasional (IMF) memainkan peran penting dalam memantau kepatuhan terhadap peraturan global serta menyediakan platform untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai contoh, IMF menawarkan bantuan keuangan untuk menstabilkan ekonomi negara-negara yang menghadapi krisis, sementara WTO berperan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan memastikan implementasi peraturan perdagangan yang adil.

⁶⁹ Andreas Pramudianto. 2016. *Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020*. Global: Jurnal Politik Internasional, Edisi 18.1. Halaman 76-94.

⁷⁰ Bambang Irianto. 2022. *Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan*. Jurnal Justiciabelen, Edisi 4.2. Halaman 26-43.

Namun, tantangan utama dalam tata kelola global adalah adanya perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara. Untuk itu, proses ini membutuhkan komitmen yang konsisten serta kemampuan untuk melakukan kompromi guna memastikan bahwa kepentingan bersama dapat diwujudkan tanpa mengorbankan stabilitas global. Melalui tata kelola global, masalah-masalah seperti keamanan siber, penyebaran penyakit menular, krisis ekonomi, dan perubahan iklim yang semuanya memerlukan respons lintas batas dapat dikelola secara efektif yang memungkinkan negara-negara untuk mengatasi tantangan bersama yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral.

Tata kelola global menyediakan landasan bagi terciptanya dunia yang lebih aman, stabil, dan terorganisasi. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen stabilitas, kolaborasi, dan komitmen internasional, tata kelola global membantu menciptakan tatanan internasional yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Dalam konteks hubungan internasional, keberhasilan tata kelola global mencerminkan kemampuan komunitas internasional untuk bersatu dalam menghadapi ancaman bersama dan membangun solusi yang inklusif serta adaptif terhadap dinamika global yang terus berubah. Dengan segala pertimbangan, membangun dan mempertahankan tata kelola global tidak hanya menjadi upaya kolektif untuk menciptakan ketertiban dunia tetapi juga sarana penting untuk memperkuat hubungan internasional di tengah ketidakpastian. Dalam kerangka ini, tata kelola global menjadi pilar utama untuk melindungi

kepentingan bersama, memastikan keseimbangan kekuasaan, dan mendorong terciptanya tatanan dunia yang stabil dan harmonis.

2.2.3 Mengatasi Tantangan Global Bersama

Untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kerja sama internasional menjadi komponen esensial dalam menjaga stabilitas dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.⁷¹ Politik dan kekuatan internasional memiliki peran krusial dalam mengkoordinasikan upaya bersama yang mampu menjangkau berbagai isu lintas negara. Masalah global seperti terorisme internasional, perubahan iklim, proliferasi senjata nuklir, krisis pengungsi, dan pandemi merupakan contoh nyata dari ancaman yang tidak dapat diatasi oleh satu negara secara unilateral. Kerja sama erat dan pendekatan multilateral diperlukan karena sifat tantangan ini sering kali melampaui batas-batas geografis serta berdampak signifikan pada tatanan global.

Perubahan iklim menempati posisi sentral sebagai salah satu isu global paling mendesak.⁷² Dalam hal ini, diplomasi dan negosiasi internasional memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka kerja kolektif yang mampu merespons perubahan lingkungan secara efektif. Negara-negara industri, seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, memiliki peran strategis dalam memimpin negosiasi yang bertujuan

⁷¹ Fitri Awaliyah, et al. 2022. *Telaah Implementasi: Global Citizen dan Pengungsian di Beberapa Negara*. Jurnal Pendidikan Transformatif, Edisi 1.3. Halaman 93-107.

⁷² Robet Asnawi. 2015. *Perubahan iklim dan kedaulatan pangan di Indonesia. Tinjauan produksi dan kemiskinan*. Sosio Informa, Edisi 1.3.

membangun kesepakatan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Melalui inisiatif seperti Perjanjian Paris, negara-negara maju tidak hanya menunjukkan kepemimpinan tetapi juga menggunakan soft power mereka untuk mendorong keterlibatan negara-negara lain. Langkah ini mencerminkan bagaimana kekuatan diplomasi dapat digunakan untuk membentuk komitmen global terhadap isu-isu keberlanjutan.

Negara-negara maju juga memanfaatkan kapasitas ekonomi dan teknologi mereka untuk mendukung negara-negara berkembang dalam menangani dampak perubahan iklim. Dukungan finansial, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas menjadi strategi penting dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan di negara-negara berkembang.⁷³ Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan ketahanan negara-negara tersebut terhadap dampak perubahan iklim tetapi juga menciptakan sinergi dalam mencapai target global yang lebih luas. Selain itu, kolaborasi semacam ini menggambarkan bagaimana stabilitas global dapat dipertahankan melalui solidaritas internasional dan pembagian tanggung jawab yang adil.

Di luar isu perubahan iklim, tantangan lain seperti terorisme internasional dan proliferasi senjata nuklir juga membutuhkan pendekatan kolektif.⁷⁴ Koalisi antar negara sering kali dibentuk untuk memastikan

⁷³ Muhammad Amsal Sahban, SE, M. M. 2018. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Sah Media.

⁷⁴ Claudia Syarifah. 2024. *Dilema Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa: Tinjauan Terhadap Tantangan Struktural Dan Kegagalan Dalam Penyelesaian Konflik Global*. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Edisi 10.3.

respons yang terkoordinasi dalam menangani ancaman terhadap keamanan internasional. Dalam perang melawan terorisme, pertukaran intelijen, sumber daya, dan strategi antiterorisme menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas global. Kerja sama ini menunjukkan bagaimana stabilitas dapat dicapai melalui integrasi sumber daya dan pemahaman yang mendalam antarnegara.

Proliferasi senjata nuklir, di sisi lain, menghadirkan ancaman eksistensial yang memerlukan pengelolaan melalui perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). Melalui dialog diplomatik dan mekanisme verifikasi, negara-negara berupaya untuk menekan penyebaran senjata nuklir, menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan mengurangi risiko konflik bersenjata. Perjanjian semacam ini mencerminkan bagaimana tatanan internasional dapat distabilkan melalui komitmen multilateral terhadap pengendalian senjata dan penggunaan teknologi nuklir secara damai.

Tantangan global lainnya yang tak kalah signifikan adalah pandemi dan krisis pengungsi.⁷⁵ Dalam menangani pandemi, kerja sama internasional dalam distribusi vaksin, penguatan sistem kesehatan, dan penyediaan bantuan medis menjadi faktor penentu keberhasilan. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, badan-badan internasional seperti WHO berperan dalam mengoordinasikan upaya global, sementara negara-

⁷⁵ Sukawarsini Djelantik. 2020. *Kerjasama Global Menangani The "Great Lockdown"; Pendekatan Diplomasi Multijalur*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi 113-120.

negara anggota memberikan kontribusi signifikan melalui pendanaan dan sumber daya.⁷⁶ Kerja sama semacam ini menyoroti pentingnya solidaritas global dalam merespons situasi darurat yang berdampak luas.

Demikian pula krisis pengungsi memerlukan koordinasi lintas negara untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi individu yang terkena dampak konflik dan bencana. Organisasi internasional seperti UNHCR bekerja sama dengan negara-negara tuan rumah untuk menyediakan layanan dasar, bantuan kemanusiaan, dan solusi jangka panjang bagi pengungsi. Dalam mengatasi tantangan global memerlukan strategi yang dibangun di atas fondasi kerja sama internasional yang solid. Kerja sama semacam ini tidak hanya menciptakan stabilitas tetapi juga memperkuat tatanan internasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.2.4 Membangun Aliansi dan Mempertahankan Kepentingan Nasional

Aliansi internasional memainkan peran fundamental dalam politik dunia karena menyediakan mekanisme bagi negara-negara yang memiliki kepentingan dan ancaman serupa untuk bersinergi demi mencapai tujuan bersama.⁷⁷ Dalam dinamika global yang penuh tantangan dan kompleksitas, negara-negara tidak dapat bertindak sendiri untuk mengatasi beragam potensi hambatan. Aliansi internasional memberikan wadah strategis yang

⁷⁶ Mochammad Ihsan Kamil Irawan, et al. 2021. *Diplomasi Vaksin: Upaya Cina dalam Menggunakan Vaksin Covid-19 sebagai Alat Soft-Power*. TransBorders: International Relations Journal, Edisi 5.1. Halaman 34-49.

⁷⁷ Bayu Hanuranto Wicaksono. 2024. *Pengaruh Aliansi Trilateral Aukus Terhadap Keamanan Kawasan Regional Asia Pasifik*. Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, Edisi 1.1.

tidak hanya meningkatkan stabilitas global tetapi juga memperkuat kerjasama lintas negara dalam menghadapi berbagai tantangan bersama.

Keberadaan aliansi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memajukan kepentingan individu tetapi juga sebagai alat untuk memperkokoh keamanan internasional. Dalam menghadapi ancaman dari aktor non-negara maupun negara lain, negara-negara yang membentuk aliansi biasanya diikat oleh kepentingan geopolitik yang saling menguntungkan. Dengan adanya aliansi, negara-negara mampu merespons isu-isu internasional secara lebih cepat, efektif, dan efisien melalui pembentukan koalisi strategis.

Pengembangan kekuatan ekonomi dan militer menjadi elemen vital dalam membentuk dan mempertahankan aliansi. Negara-negara dengan pengaruh militer dan ekonomi yang besar cenderung menarik dukungan internasional untuk membangun kemitraan strategis yang kuat. Sebagai contoh, Amerika Serikat melalui NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) berkolaborasi dengan sekutu-sekutunya untuk menghadapi ancaman global, baik dari organisasi teroris maupun negara-negara yang dianggap bermusuhan. Kerangka NATO memungkinkan negara-negara anggotanya untuk memperkuat pertahanan kolektif sekaligus menciptakan sinergi dalam menangani krisis internasional.⁷⁸

⁷⁸ Abhiram Singh Yadav. 2022. *Indo-Pasifik: sebuah konstruksi geopolitik*. Elex Media Komputindo.

Aliansi militer seperti NATO menunjukkan bagaimana kerja sama strategis dapat mendorong stabilitas, baik di kawasan Eropa maupun di luar kawasan. Misalnya, prinsip pertahanan kolektif NATO memastikan bahwa serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi.⁷⁹ Pendekatan ini menciptakan jaminan keamanan yang memperkuat stabilitas kawasan dan memberikan rasa aman bagi anggotanya.

Di kawasan Asia Tenggara, aliansi regional seperti ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) memberikan contoh nyata bagaimana stabilitas dapat dipertahankan melalui pendekatan kolektif. Negara-negara anggota ASEAN bekerja sama secara aktif untuk menangani berbagai masalah regional, termasuk ketegangan di Laut Cina Selatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa aliansi internasional tidak hanya berfokus pada aspek militer tetapi juga melibatkan kerja sama di bidang ekonomi, diplomasi, dan politik untuk mencapai tujuan bersama.⁸⁰

Meski memiliki banyak manfaat, keberhasilan aliansi internasional sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya dalam menyeimbangkan kepentingan nasional. Pembangunan aliansi yang efektif membutuhkan strategi diplomasi yang matang untuk memastikan bahwa kerja sama tidak merugikan kedaulatan atau kepentingan strategis negara-

⁷⁹ Sirwan Yazid Bustami. 2023. *Perubahan Kebijakan Pertahanan Turki Mendukung Keanggotaan Finlandia di North Atlantic Treaty Organization (NATO): Perspektif Reputasi*. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, Edisi 5.1. Halaman 77-99.

⁸⁰ Irma Samrotul Fuadah. 2020. *Modul pembelajaran SMA sejarah Indonesia kelas XII: peran Indonesia dalam perdamaian dunia*.

negara anggotanya. Setiap negara harus secara cermat mengevaluasi sejauh mana keterlibatan mereka dalam aliansi tersebut dapat mendukung tujuan nasional mereka tanpa mengorbankan otonomi dalam pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, politik internasional adalah seni melindungi kepentingan nasional sambil membangun koalisi yang mendukung tujuan bersama. Melalui aliansi, negara-negara dapat menciptakan peluang untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan, meningkatkan stabilitas, dan memperkokoh keamanan kolektif. Namun, untuk memastikan bahwa aliansi ini tetap efektif dan bertahan lama, negara-negara anggota perlu menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap kerja sama internasional dan perlindungan kepentingan nasional.

Aliansi internasional dapat berfungsi sebagai katalisator dalam menciptakan stabilitas global.⁸¹ Kemitraan strategis ini tidak hanya membantu negara-negara dalam merespons tantangan global tetapi juga memperkuat dasar tatanan internasional yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, dan diplomasi, aliansi internasional menyediakan platform yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama secara konstruktif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

⁸¹ Jerry, Ganis Purnaningtyas Indrawan, and Dede Suprayitno. 2023. *Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Sebagai Sarana Diplomasi Indonesia Secara Global*. Jurnal Kewarganegaraan, Edisi 7.1. Halaman 998-1008.

2.3 *Anime One Piece*

One Piece adalah serial anime dan manga yang terkenal di seluruh dunia, yang dibuat oleh mangaka Jepang, Eiichiro Oda. Sejak penerbitan pertamanya pada tahun 1997 di majalah Weekly Shonen Jump, manga ini telah memikat jutaan pembaca dan pemirsa di seluruh dunia. Selain menyajikan aksi dan petualangan, *One Piece* juga mengeksplorasi tema-tema yang mendalam seperti persahabatan, aspirasi, kebebasan, dan keadilan. Narasinya berfokus pada seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy, yang bercita-cita untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut dan menemukan harta karun yang dikenal sebagai *One Piece*. Luffy membentuk sebuah tim, yang masing-masing anggotanya memiliki aspirasi dan tujuan hidup yang tangguh.⁸²

Anime *One Piece* bercerita tentang seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy, yang bermimpi menjadi Raja Bajak Laut dengan mencari harta karun terkenal yang dikenal dengan nama "*One Piece*." Luffy, setelah memakan Buah Iblis Gomu Gomu no Mi, mendapatkan kekuatan elastis dan menciptakan kru yang dikenal sebagai Bajak Laut Topi Jerami. Mereka berangkat untuk menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun. Luffy dan kruanya bertemu dengan berbagai karakter di setiap petualangan, termasuk teman dan musuh, dan menghadapi tantangan yang berbeda yang

⁸² Luthfi Mubarak, H. M. MukhsinJamil, and M. Ag Tsuwaibah. 2020. *Kegilaan Peradaban Pada One Piece Lovers Semarang (Tinjauan Moralitas Michel Foucault dan Etika Islam)*.

mendorong kemampuan fisik, ketahanan mental, dan keyakinan etis mereka hingga ke batasnya.

Kisah *One Piece* berkisar pada perjuangan antara kebebasan pribadi dan batasan sistem masyarakat. Bajak Laut Topi Jerami mewakili penentangan yang kuat terhadap ketidakadilan di dunia, berdiri melawan kekuatan korup seperti Pemerintah Dunia dan Marinir. Petualangan mereka bukan hanya tentang mencari harta karun, tetapi juga menyampaikan pesan tentang kebebasan dan perjuangan melawan ketidakadilan. Kisah ini penting karena mencerminkan perjuangan sosial yang dihadapi banyak orang dalam kehidupan nyata.⁸³

Dunia *One Piece* penuh dengan elemen yang unik dan beragam. Ceritanya berlatar belakang lautan luas yang memiliki pulau-pulau misterius dan perairan berbahaya. Cerita ini membawa pembaca dan pemirsa dalam petualangan yang menakjubkan dengan makhluk-makhluk aneh, musuh yang kuat, dan pemandangan yang menakjubkan. Samudra Grand Line adalah tempat semua petualangan ini terjadi. Tempat ini terkenal dengan tantangannya yang berbahaya dan perubahan cuaca yang gila. *One Piece* dikatakan tersembunyi di Grand Line, sebuah harta karun yang ditinggalkan oleh mantan Raja Bajak Laut, Gol D. Roger, dan hanya dapat ditemukan oleh seseorang dengan tekad yang luar biasa.

⁸³ *Ibid.*,

Setiap pulau yang dikunjungi Luffy dan kru nya memiliki cerita dan konflik uniknya sendiri, berurusan dengan hal-hal seperti penguasa yang menindas, ketidakadilan sosial, dan perjuangan penduduk setempat melawan kekuatan besar. Luffy dan teman-temannya berpetualang di setiap alur cerita, tetapi mereka juga membantu mereka yang membutuhkan, menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang penting.

Salah satu kekuatan utama *One Piece* adalah kemampuannya untuk menyampaikan kritik sosial melalui narasinya. Dalam dunia *One Piece*, Pemerintah Dunia sering kali digambarkan sebagai entitas yang korup dan tidak adil, dengan tindakan represif yang sering merugikan masyarakat. Dalam beberapa arc seperti Alabasta, Enies Lobby, dan Dressrosa, anime ini menyoroti bagaimana kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak diawasi dapat menciptakan ketidakadilan dan penindasan. Bajak Laut Topi Jerami, yang dipimpin oleh Luffy, kerap bertindak sebagai pembela bagi mereka yang tertindas, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang keberanian moral untuk melawan ketidakadilan.⁸⁴

Jika melihat dari kacamata hubungan internasional, tantangan yang dihadapi oleh Monkey D. Luffy dan kru Bajak Laut Topi Jerami dapat dianalogikan dengan berbagai masalah yang dihadapi negara-negara dalam sistem global. Luffy, bersama teman-temannya, seringkali berhadapan dengan musuh-musuh yang mencerminkan kekuatan besar dan sistem

⁸⁴ *Ibid.*,

otoriter di dunia nyata, yang sering kali beroperasi dalam politik internasional yang penuh intrik dan konflik.⁸⁵ Dua entitas besar yang menjadi musuh utama Luffy adalah Marinir dan Pemerintah Dunia. Keduanya berfungsi sebagai representasi dari kekuatan otoriter yang berusaha mempertahankan status quo dan menindas kebebasan serta aspirasi individu, yang menggambarkan konflik antara kebebasan pribadi dan batasan sistem masyarakat yang lebih besar.

Marinir, yang berperan sebagai lembaga militer yang mewakili Pemerintah Dunia, berfungsi sebagai agen pengendali yang mengawasi dan menjaga stabilitas dalam dunia *One Piece*. Mereka sering kali digambarkan sebagai kekuatan yang bertindak untuk menjaga kedamaian melalui kekuasaan yang represif, tanpa mempertimbangkan kebebasan individu atau hak-hak rakyat. Dalam politik internasional, ini mirip dengan negara-negara besar yang menggunakan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas regional atau internasional, terkadang dengan cara yang kontroversial, seperti dalam intervensi militer atau perang untuk mempertahankan hegemoni.⁸⁶ Penggunaan kekuatan militer yang berlebihan oleh marinir di *One Piece* menunjukkan bagaimana kekuasaan militer dapat mengekang kebebasan dan menciptakan ketidakadilan, mirip dengan situasi di mana negara-negara

⁸⁵ Budi Setiyono. 2019. *Konsepsi dan Perbandingan Politik*.

⁸⁶ Ilah Nuridah, et al. 2024. *Amerika Serikat sebagai Negara Adikuasa: Pengaruh dan Dominasi dari Akhir Abad ke-20 hingga Awal Abad ke-21*. Polyscopia, Edisi 1.3. Halaman 157-161.

berdaulat terpaksa berhadapan dengan kekuatan asing yang dominan dalam politik internasional.

Pemerintah Dunia, sebagai entitas yang lebih besar, berfungsi sebagai simbol dari kekuasaan politik yang sangat terpusat dan korup, mengendalikan dunia dengan tangan besi. Pemerintah Dunia menciptakan sistem yang menindas dan tidak adil, di mana mereka mengesampingkan hak-hak rakyat demi menjaga kekuasaan dan status quo. Dalam realitas hubungan internasional, ini mirip dengan pemerintahan otoriter atau rezim yang tidak mengindahkan hak asasi manusia dan hanya berfokus pada kekuatan politik mereka, sering kali dengan cara yang merugikan rakyatnya.⁸⁷ Pemerintah Dunia di *One Piece* juga menunjukkan betapa pentingnya memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam hubungan internasional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.



Gambar 2.1 Pemerintah Dunia dalam Serial Anime *One Piece*

⁸⁷ Muhamad Iqbal Susanto. 2019. *Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Halaman 225-237.

Melihat struktur pemerintahan dunia dalam *One Piece*, kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam dua dimensi utama dalam politik internasional. Pertama adalah otoritarianisme dan korupsi dalam sistem pemerintahan. Pemerintah Dunia dalam *One Piece* adalah contoh dari suatu rezim yang sangat terpusat, di mana keputusan-keputusan penting diambil oleh segelintir orang yang berada di puncak kekuasaan tanpa memperhitungkan hak-hak rakyat atau keadilan sosial. Dalam politik internasional, ini bisa disamakan dengan rezim yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas oposisi, membungkam kebebasan berbicara, dan menegakkan kontrol yang ketat terhadap masyarakat.⁸⁸ Pemerintah Dunia juga menggunakan alat-alat seperti Marinir untuk menjaga hegemoni mereka, yang sering kali memicu perlawanan dari mereka yang ingin memperjuangkan kebebasan dan hak mereka.



Gambar 2.2 Luffy melawan pemimpin marinir pada *Arc Marine Ford*

⁸⁸ Munadi. 2019. *Oposisi dan Koalisi*. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Edisi 2.1. Halaman 1-20.

Kedua adalah ketidakadilan sosial dan penindasan terhadap kelompok tertentu.⁸⁹ Pemerintah Dunia tidak hanya mengontrol negara-negara, tetapi juga menindas individu dan kelompok yang dianggap ancaman terhadap kestabilan mereka. Luffy dan krunya sering kali melawan ketidakadilan ini, seperti yang terlihat dalam pertempuran mereka melawan entitas seperti Enies Lobby, tempat di mana kekuasaan dan hukum digunakan untuk menindas mereka yang tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Dunia. Hal ini dapat dibandingkan dengan bagaimana dalam politik internasional, negara-negara dengan kekuatan besar sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk menindas negara-negara yang lebih lemah atau mendominasi kebijakan internasional demi kepentingan mereka sendiri, yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan global.

2.3.1 Isu Isu politik pada anime *One Piece*

2.3.1.1 Hegemoni dan Kekuasaan Pemerintah Dunia

Salah satu kekuatan politik utama di alam semesta *One Piece* adalah Pemerintah Dunia, yang memiliki kendali atas sebagian besar wilayah dan memegang otoritas yang signifikan.⁹⁰ Angkatan Laut memberikan dukungan sebagai kekuatan militer global, sementara *Tenryuubito*, atau Bangsawan Dunia, mewakili elit aristokrat yang dilindungi yang sering

⁸⁹ Muhammad Tahir Laming. 2021. *Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan*. Meraja journal, Edisi 4.2. Halaman 269-278.

⁹⁰ Syaf Reiza Rachmadani, Elly Warnisyah Harahap, and Kasron Nasution. 2023. *Nilai–Nilai Etika dalam Anime One Piece Movie Red Perspektif Aristoteles dalam Buku Etika Nikomakea*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Edisi 7.3. Halaman 21299-21305.

berperilaku sewenang-wenang. Pemerintah Dunia mempertahankan kontrolnya dengan menggunakan kekerasan, menyebarkan propaganda, dan menyensor informasi, yang berarti masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menentang kebijakan yang tidak adil.

Pemerintah Dunia adalah kekuatan dominan yang bertujuan untuk menjaga agar segala sesuatunya tetap sama dengan mengelola informasi dan mengambil tindakan terhadap mereka yang menentangnya, seperti bajak laut dan Tentara Revolusioner. Dalam hubungan internasional, Pemerintah Dunia dapat dibandingkan dengan aktor negara atau entitas supranasional yang bertujuan untuk memberikan pengaruh dan memastikan stabilitas dalam sistem dengan mengelola kekuatan politik dan militer.

2.3.1.2 Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

One Piece menunjukkan bagaimana para pejabat di Pemerintahan Dunia dan Angkatan Laut sering menipu dan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Banyak orang yang tidak jujur di Pemerintahan Dunia, seperti Bangsawan Dunia (*Tenryuubito*), memanfaatkan dan menyalahgunakan orang tanpa khawatir ketahuan.⁹¹ Orang-orang yang berkuasa di pemerintahan sering menggunakannya untuk membantu diri mereka sendiri atau orang-orang yang mereka dukung.

⁹¹ Muhammad Ridha. 2019. *Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Menonton Anime One Piece dan Dampaknya Bagi Keluarga* (Studi Kasus Pada Komunitas One Piece Kolektor Indonesia Regional Medan, "KOPKI Medan"). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Salah satu contoh yang jelas adalah bagaimana Donquixote Doflamingo menggunakan kekerasan dan tipu muslihat untuk mengambil alih kerajaan Dressrosa. Pemerintah Dunia tidak dapat menghentikannya karena adanya kesepakatan antara Doflamingo dan para pemimpin dari Pemerintah Dunia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana koneksi politik dan korupsi dapat melindungi orang-orang yang berkuasa, bahkan ketika mereka melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia.

2.3.1.3 Revolusi dan Perlawanan terhadap Otoritas

Kekuatan politik utama yang menentang Pemerintah Dunia di *One Piece* adalah Pasukan Revolusi, yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon, yang merupakan ayah Luffy. Tentara ini bertujuan untuk membebaskan dunia dari tirani Pemerintah Dunia, dengan misi membongkar sistem politik yang mereka anggap korup dan tidak adil.

Revolusi merupakan perlawanan terhadap hegemoni dan tirani, karena individu yang tertindas berusaha untuk mengembalikan kebebasan mereka. Revolusi adalah motif politik yang menonjol di *One Piece*, yang menunjukkan bagaimana komunitas atau bangsa yang tertindas sering bangkit melawan rezim yang menindas untuk menuntut hak-hak mereka. Gerakan ini sejajar dengan berbagai revolusi yang terjadi di bawah rezim otoriter yang melanggar kebebasan individu.

Pasukan Revolusioner memiliki tujuan yang jelas: untuk membongkar Pemerintahan Dunia dan memberantas sistem yang menindas

rakyat. Mereka berpendapat bahwa Pemerintah Dunia tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan memperkuat agenda kelas atas, termasuk *Tenryuubito* atau Bangsawan Dunia. Pemerintah Dunia berusaha untuk mempertahankan otoritasnya dengan kekuatan militer dan jaringan yang berpengaruh, bahkan dengan mengorbankan rakyatnya.⁹²

Monkey D. Dragon, sebagai pemimpin Revolusi, terus menerus menekankan pentingnya keadilan, kebebasan, dan persamaan hak untuk semua individu, terlepas dari peringkat sosial ekonomi atau ras. Sebagai individu yang penuh teka-teki dan terhormat, Naga dengan tegas berdedikasi untuk menentang Pemerintah Dunia dengan cara apa pun. Tentara Revolusi muncul sebagai mercusuar harapan bagi bangsa-bangsa yang ditaklukkan, menyatukan mereka di bawah bendera kebebasan untuk memerangi kekuatan hegemonik yang menindas.

Revolusi di *One Piece* secara langsung menentang sistem hegemoni yang dilembagakan oleh Pemerintah Dunia. Hegemoni ini dibangun dengan kuat dan dipertahankan dengan menggunakan kekuatan militer, propaganda, dan kebrutalan untuk mempertahankan otoritasnya. Pasukan Revolusi berfungsi sebagai oposisi sejati, menantang rezim yang tidak adil dan memotivasi rakyat untuk mencapai pembebasan mereka.

Revolusi ini menunjukkan bahwa penganiayaan yang berkepanjangan akan memicu pemberontakan. Pasukan Revolusioner

⁹² *Ibid.*

beroperasi di berbagai negara, membebaskan daerah-daerah yang ditaklukkan dari rezim tirani, seperti yang diilustrasikan dalam berbagai busur *One Piece*, ketika mereka secara efektif membongkar administrasi lokal yang selaras dengan Pemerintah Dunia. Hal ini mewakili perjuangan melawan otoritarianisme, ketika orang-orang yang sebelumnya dibungkam menuntut hak-hak mereka.

2.3.1.4 Kebebasan dan Hak asasi Manusia

Kebebasan adalah topik utama dalam *One Piece*, dengan banyak karakter, termasuk Luffy, yang berjuang untuk mendapatkan kemampuan untuk hidup bebas dan memilih nasib mereka sendiri. Bajak laut di *One Piece* sering kali mewakili kebebasan dan perlawanan terhadap pemerintahan yang menindas.⁹³ Luffy menghargai kebebasan di atas segalanya, dan dia bersedia melawan Pemerintah Dunia untuk menjaga kebebasan orang lain. Kebebasan ini termasuk hak asasi manusia seperti kebebasan dari penindasan, hak untuk mengekspresikan diri, dan hak untuk memilih. Dalam pengertian politik, perjuangan Luffy dapat dianalogikan dengan kampanye hak asasi manusia lainnya yang melawan rezim yang menindas atau membatasi kebebasan individu dan masyarakat. Isu ini menekankan nilai memperjuangkan hak dan kebebasan sebagai dasar keadilan sosial.

⁹³ Rahmat Yasim, et al. 2022. *Corak Corak Maritim dalam Anime One Piece*. Jurnal Mahasiswa Antropologi 1.2. Halaman 145-170.

Alur cerita *One Piece* mencakup subjek-subjek utama seperti kebebasan dan hak asasi manusia. Perjuangan Luffy dan kruinya untuk hidup bebas dan mengendalikan nasib mereka sendiri mencontohkan semangat kebebasan, yang sering dianggap sebagai hak asasi manusia. Bajak laut dalam novel ini lebih dari sekadar pemburu harta karun atau perompak, mereka adalah simbol perlawanan terhadap kekuatan yang tidak adil, terutama Pemerintah Dunia yang menindas.⁹⁴

Kebebasan berekspresi, kebebasan memilih, dan perjuangan melawan penindasan merupakan topik-topik yang dibahas dalam narasi, yang mengarah pada kesamaan dengan kampanye hak asasi manusia yang sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Ada sejumlah karakter di *One Piece* yang mengalami penindasan atau ketidakadilan. Karakter-karakter ini mulai dari suku Fishman, yang mengalami diskriminasi, hingga Robin, yang dikejar-kejar untuk mendapatkan informasi yang dianggap berbahaya oleh pihak berwenang. Setiap konflik ini mencontohkan pentingnya kebebasan sebagai dasar dari keadilan sosial, dan mereka memprovokasi pemikiran tentang pentingnya memperjuangkan hak setiap individu atau kelompok untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bebas dari segala bentuk paksaan atau prasangka.

⁹⁴ Farrel Brilliant, dan Irwan Dwi Arianto. 2023. Representasi Hegemoni Dalam Anime *One Piece* Pada Tragedi Ohara (Analisis Semiotika John Fiske). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10.11. Halaman 4997-5007.

Dalam konteks politik, *One Piece* mengangkat masalah kebebasan dan hak asasi manusia dengan cara yang sangat sederhana dan ringkas, yang merefleksikan perlawanan terhadap rezim totaliter dan kekuasaan yang menindas.⁹⁵ Sebagai entitas yang berusaha mempertahankan status quo dengan kontrol yang ketat, Pemerintah Dunia dalam novel ini dapat diibaratkan sebagai entitas yang menekan kebebasan individu dan kelompok untuk mencapai tujuannya. Sebagai ilustrasi, Pemerintah Dunia tidak hanya menindas rakyatnya, tetapi juga berusaha untuk melakukan kontrol terhadap pengetahuan dan informasi yang mereka miliki. Banyak tokoh-tokoh kunci yang menjadi sasaran ketidakadilan yang merupakan hasil dari tirani ini, yang dapat dilakukan secara langsung melalui penggunaan kekuatan militer atau secara tidak langsung melalui manipulasi masyarakat.

2.3.1.5 Aliansi dan Diplomasi Internasional

Pada episode, sejumlah kerajaan besar termasuk *Kingdom of Alabasta* dan *Dressrosa*, mengirimkan perwakilan mereka ke Konferensi Reverie. Konferensi Reverie adalah sebuah acara yang melibatkan pertemuan para pemimpin kerajaan dari berbagai negara di dunia, termasuk raja dan ratu dari kerajaan-kerajaan yang ada. Konferensi ini biasanya diselenggarakan setiap empat tahun sekali di Mary Geoise, ibu kota

⁹⁵ Nurhadiansah Irman. 2021. *Analisis unsur intrinsik tokoh dan penokohan Nico Robin dalam komik One Piece karya Oda Eiichiro*. Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya, 5(1). Halaman 139-144.

Pemerintah Dunia, dan bertujuan untuk membahas berbagai masalah global, termasuk politik, aliansi, dan kebijakan yang mempengaruhi dunia. Konferensi Reverie di *One Piece* merupakan cerminan yang sangat baik dari dinamika aliansi dan diplomasi internasional dalam konteks politik global. Pemerintah Dunia menyelenggarakan Reverie untuk mempertemukan para pemimpin dari kerajaan-kerajaan anggota organisasi ini untuk memperdebatkan tantangan politik, ekonomi, dan keamanan global. Konferensi ini mirip dengan forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana negara-negara mendiskusikan perdamaian, pembangunan, dan kolaborasi internasional.

Meskipun Reverie dimaksudkan sebagai forum diplomasi yang adil dan saling menguntungkan, kenyataannya lebih mirip dengan dinamika yang terjadi di banyak badan internasional, di mana keputusan sering kali dipengaruhi oleh negara-negara besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Keputusan dalam Reverie sering kali diambil demi kepentingan Pemerintah Dunia dan negara-negara besar yang mendukungnya, sementara pendapat negara-negara kecil atau mereka yang tidak setuju dengan agenda besar sering kali diabaikan. Hal ini menunjukkan bagaimana negara-negara besar atau blok kekuatan dalam sistem internasional dapat menggunakan pengaruhnya untuk memaksakan keputusan yang hanya menguntungkan pihak mereka, meskipun keputusan tersebut tidak adil bagi negara-negara yang lebih kecil atau lebih lemah.

Di Reverie, berbagai negara dan kerajaan berusaha melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing, tetapi mereka juga harus membuat pilihan apakah akan bergabung dengan negara lain atau melawan Pemerintah Dunia.⁹⁶ Hal ini membuat keadaan menjadi lebih mirip dengan hubungan internasional di dunia nyata, di mana negara-negara harus menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer saat mereka memutuskan untuk bergabung atau memihak dalam perang global.

Beberapa negara, seperti kerajaan Alabasta dan Dressrosa, membuat aliansi untuk melawan Pemerintah Dunia. Ini adalah contoh bagaimana mereka memilih untuk melawan aturan dan kebijakan Pemerintah Dunia.⁹⁷ Meskipun efek dari pilihan besar yang dibuat di tingkat internasional berbahaya, mereka ingin melindungi kedaulatan negara mereka sendiri. Hal ini mirip dengan bagaimana negara-negara yang tidak menyerah pada tekanan atau ancaman kekuatan besar berperilaku diplomatis di dunia nyata.

Salah satu aspek penting dari aliansi dan diplomasi dunia yang digambarkan dalam *One Piece* adalah bahwa, terlepas dari pertemuan diplomatik seperti Reverie, ketegangan dan konflik internasional tetap ada. Aliansi dibentuk tidak hanya untuk mempromosikan perdamaian, tetapi juga untuk melindungi satu sama lain atau memperjuangkan kepentingan yang sama yang dapat mengancam supremasi kekuatan besar. Seperti yang

⁹⁶ Astuty, Windha. 2023. *Representasi Eksistensi Pers dalam Serial Anime One Piece*. Diss. IAIN Parepare.

⁹⁷ Dicky Mylano Irawan, 2019. *Representasi Rasial Dalam Serial Anime One Piece Analisis Hermeutika Gadamer*. Diss. IAIN Purwokerto.

terlihat dari peristiwa dramatis di Reverie, ketegangan antara negara-negara yang mendukung Pemerintah Dunia dan mereka yang menolaknya mendorong dunia ke ambang konflik terbuka.

Hal ini sangat mirip dengan politik internasional di dunia nyata, di mana sesi diplomatik sering diadakan untuk meredakan ketegangan, tetapi kesenjangan yang ada dalam sistem internasional dan ketidakseimbangan kekuatan dapat memicu konflik atau perang lebih lanjut. Sebagai contoh, perselisihan antara negara besar dan kecil sering kali dipicu oleh kebijakan luar negeri yang menguntungkan negara besar, sementara negara kecil mengalami penindasan atau ketidakberdayaan dalam pengambilan keputusan internasional.

Dari sudut pandang politik, Reverie di *One Piece* merepresentasikan proses diplomasi internasional yang penuh dengan ketegangan dan konflik kepentingan. Aliansi, perjanjian, dan pengaruh kekuatan besar lebih diutamakan, sementara negara-negara yang lebih kecil atau mereka yang menantang negara dominan sering kali terpinggirkan. *One Piece* memberikan gambaran tajam tentang kesenjangan yang ada dalam sistem politik dunia, dengan menekankan pentingnya memperjuangkan keadilan dan keseimbangan kekuatan dalam koalisi global.⁹⁸

⁹⁸ Rochmad Kartiko. 2020. *Information Blocking Dalam Serial Manga One Piece*. Jurnal Ilmu Perpustakaan (Jiper) 2.2.

2.3.2 Isu Isu Sosial pada Anime *One Piece*

2.3.2.1 Diskriminasi dan Rasisme

Masalah sosial yang menonjol dalam *One Piece* adalah diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama antara manusia dan nelayan. Dalam narasi, nelayan sering kali dilihat sebagai entitas subordinat dan mengalami diskriminasi yang parah oleh manusia. Island of the Fishmen mencontohkan topik ini, termasuk sejumlah karakter yang berjuang melawan diskriminasi dan penganiayaan.⁹⁹

Pada Episode 517 – 574 digambarkan bahwa Arc Pulau Manusia Ikan adalah salah satu contoh diskriminasi rasial yang paling jelas di *One Piece*. Manusia ikan, ras yang sangat kuat dengan bakat-bakat unik, dipandang sebagai manusia yang lebih rendah oleh manusia dan sering dianiaya. Mereka dilecehkan, dieksploitasi, dan bahkan diperlakukan seperti budak. Penindasan ini mewakili rasisme struktural masyarakat, di mana suatu kelompok dinilai lebih rendah hanya berdasarkan ras atau etnis mereka. Manusia ikan menghadapi prasangka yang meluas dan sistematis baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam institusi kekuasaan yang lebih luas.

Fisher Tiger dan Ratu Otohime adalah dua tokoh yang mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi diskriminasi. Fisher Tiger

⁹⁹ Jimmy Yohanes Hyronimus. 2024. *Arc Fishman Island Manga One Piece Karya Eiichiro Oda Sebagai Ilustrasi Bagi Teologi Compassio Johann Baptist Metz Dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Kesadaran Sosial Orang Muda Katolik Paroki Roh Kudus Labuan Bajo*. Diss. IFTK LEDALERO.

memilih jalan kekerasan dan perlawanan, ingin membebaskan rasnya dari penindasan dengan cara yang radikal, bahkan jika itu mengakibatkan penderitaan dan pertumpahan darah. Sementara itu, dalam episode 535 digambarkan bahwa Ratu Otohime menginginkan perdamaian dan harmoni dengan umat manusia, berpikir bahwa melalui dialog dan kerja sama, perdamaian dapat dicapai. Kedua pendekatan ini menyoroti konflik antara mereka yang ingin melawan dengan kekerasan dan mereka yang berusaha memperbaiki keadaan melalui diplomasi dan rekonsiliasi.

Meskipun pendekatan Otohime lebih tenang, ia sering menghadapi perlawanan dari orang-orang yang lebih murung atau telah mengalami trauma akibat pengalaman sebelumnya. *One Piece* dengan kuat menggambarkan betapa sulitnya mengatasi bias dan kebencian yang telah lama dipegang, serta bagaimana upaya yang paling bermaksud baik untuk mencapai kesetaraan dan pengakuan bisa gagal.

Diskriminasi dan rasisme dalam *One Piece* adalah tema yang sangat relevan dengan isu-isu sosial yang kita hadapi di dunia nyata. Cerita tentang manusia ikan dan hubungan mereka dengan manusia adalah cermin dari ketidakadilan rasial, sementara konflik antara Fisher Tiger dan Queen Otohime menggambarkan dua pendekatan yang berbeda untuk mengatasi diskriminasi: perlawanan keras dan diplomasi.¹⁰⁰ Semua ini mengajarkan

¹⁰⁰ Moh Rizchald Walidain, dan Syihabuddin Syihabuddin. 2023. *Gambaran Pemikiran Eksistensialisme Sartre Dalam Karakter Utama Komik One Piece Karya Oda Eichiro*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9.1. Halaman 229-238.

kita pentingnya kesetaraan, pengakuan, dan perjuangan kolektif untuk melawan penindasan, sambil mengingatkan kita akan bahaya dari sistem sosial yang mendukung ketidaksetaraan dan diskriminasi.

Tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok seperti manusia ikan dengan manusia merupakan refleksi dari ketegangan yang terjadi dalam hubungan antar negara dan bangsa. Konflik rasial dan diskriminasi sosial sering kali muncul dalam bentuk pertentangan antara kekuatan dominan dan kelompok yang lebih terpinggirkan, baik dalam isu sosial maupun geopolitik. Dalam kisah *One Piece* penyelesaian konflik ini membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer atau perlawanan, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang pentingnya dialog dan kerja sama internasional. Kedua pendekatan yang digambarkan dalam cerita perlawanan keras dan diplomasi merupakan dua sisi dari perjuangan internasional yang nyata, di mana ada yang memilih untuk berkonfrontasi dan ada yang berjuang untuk mengubah dunia melalui cara yang lebih damai dan berbasis pada saling pengertian.

2.3.2.2 Ketidakadilan Sosial dan Kemiskinan

Dalam *One Piece*, ketidakadilan sosial dan kemiskinan tidak hanya muncul sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai tantangan struktural yang mendalam yang menggambarkan dinamika kekuasaan dan institusi yang melanggengkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam episode 629 – 746 digambarkan bahwa Arc Dressrosa mengalami

dinamika politik dan ekonomi yang tidak adil dapat membentuk struktur yang represif dan memperburuk kondisi kehidupan individu-individu yang terpinggirkan.

Pada episode 629, arc Dressrosa dibawah pemerintahan Donquixote Doflamingo mencontohkan ketidakadilan sosial yang muncul ketika sebuah kelompok elit menggunakan kekuasaannya untuk menyalahgunakan rakyat. Doflamingo tidak hanya memerintah dengan pendekatan otoriter, tetapi juga membangun kerangka kerja di mana ia dan rekan-rekannya mendominasi hampir semua aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial di Dressrosa. Penduduk yang ditaklukkan hidup dalam kemiskinan yang mengerikan, sementara Doflamingo dan lingkaran dalamnya bergelimang dalam kemakmuran yang luar biasa.¹⁰¹

Salah satu bentuk eksploitasi yang mencolok adalah pada episode 635 dimana dominasi Doflamingo atas sektor manufaktur dan komersial di Dressrosa mulai ditampilkan. Doflamingo mengeksploitasi institusi perbudakan untuk mengumpulkan kekayaan, memanfaatkan individu-individu yang rentan, termasuk budak manusia, sebagai alat untuk memenuhi tujuan komersial dan politiknya. Doflamingo memiliki pengaruh

¹⁰¹ Lalu Pradipta Jaya Bahari, and Vera Sari. 2024. *Prophetic Leadership: Kajian Psikologi Islam Dalam Manajemen Kepimimpinan Pada Serial Anime One Piece*. HARAPAN: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Psikologi 1.1. Halaman 28-42.

atas perdagangan senjata dengan kekuatan-kekuatan besar dan Pemerintah Dunia, sehingga memperparah ketidaksetaraan dan ketidakadilan.¹⁰²

Skenario ini mencontohkan kesenjangan sosial ekonomi yang muncul ketika faksi-faksi elit mengeksploitasi sumber daya yang tersedia untuk mengkonsolidasikan kendali mereka, sementara masyarakat umum tidak memiliki akses yang memadai untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Doflamingo, sebagai sosok otoriter yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, merepresentasikan ketidakadilan struktural yang memungkinkan orang kaya menumpuk kekayaan, sementara orang miskin merana dalam kemiskinan dan kesusahan.

Ketidakadilan sosial dan kemiskinan di *One Piece* mencerminkan ketidaksetaraan di dunia nyata, di mana kekuasaan politik dan ekonomi sering kali berpihak pada kaum elit sementara rakyat biasa terkurung dalam kemiskinan dan penderitaan. Arc Dressrosa menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tidak adil dan pengaruh politik dapat memperburuk situasi kehidupan orang-orang yang terpinggirkan. Melalui plot ini, *One Piece* menyampaikan konsep bahwa transformasi sosial yang sejati membutuhkan perjuangan bersama melawan struktur yang menindas dan pembentukan masyarakat yang lebih adil bagi semua.

¹⁰² Syaf Reiza Rachmadani, Elly Warnisyah Harahap, and Kasron Nasution. 2023. *Nilai–Nilai Etika dalam Anime One Piece Movie Red Perspektif Aristoteles dalam Buku Etika Nikomakea*. Jurnal Pendidikan Tambusai 7.3. Halaman 21299-21305.

Dalam *One Piece*, ketidakadilan sosial dan kemiskinan yang terjadi dalam arc Dressrosa menggambarkan ketegangan yang ada dalam hubungan internasional, di mana kekuasaan dan dominasi negara-negara besar sering kali merugikan negara-negara kecil dan rakyatnya.¹⁰³ Pemerintahan Doflamingo, sebagai figur otoriter, dapat diibaratkan sebagai metafora bagi pemerintah-pemerintah yang cenderung mengeksploitasi negara-negara lemah demi kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri. Doflamingo menggunakan hubungan dengan kekuatan besar dan Pemerintah Dunia untuk memperkuat kekuasaannya, yang pada gilirannya menciptakan ketidaksetaraan sosial yang sangat mencolok. Hal ini mencerminkan dinamika dalam hubungan internasional di dunia nyata, di mana negara-negara besar memanfaatkan pengaruh mereka untuk mengontrol sumber daya dan memperburuk ketidakadilan di negara-negara berkembang. Dengan demikian, arc Dressrosa dalam *One Piece* bukan hanya cerita tentang penindasan domestik, tetapi juga menggambarkan dinamika global yang terjadi di dunia nyata, di mana perjuangan melawan ketidakadilan sosial dan ekonomi adalah tantangan yang melibatkan banyak pihak yang saling berhubungan secara internasional.

2.3.2.3 Perbudakan dan Eksploitasi

Perbudakan dan eksploitasi di *One Piece* adalah suatu tema yang menggambarkan praktik perbudakan dan eksploitasi kontemporer. Dalam

¹⁰³ Marina Hendriyana, and Nurintan An Alfiyah. 2022. *Dominasi Elite Dalam Politik*. Opini Politik Kaum Muda, Edisi 1.

cerita, perbudakan digambarkan tidak hanya sebagai penjajahan fisik atau kerja paksa, tetapi juga sebagai semacam penindasan yang berdampak pada kehidupan psikologis, emosional, dan sosial seseorang. *One Piece* menggunakan kisah-kisah tragis seperti Kuma, Shirley, Franky, dan Mereka yang Diperbudak oleh *Tenryuubito* untuk menyajikan pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana perbudakan dan eksploitasi tidak hanya merampas kebebasan fisik, tetapi juga mengikis martabat dan hak asasi manusia. Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan yang dapat ditemukan dalam sistem internasional, di mana negara-negara dengan kekuatan dominan sering kali menindas negara-negara yang lebih lemah melalui kebijakan yang merugikan rakyatnya.¹⁰⁴

Salah satu kasus eksploitasi yang paling mencolok di *One Piece* terjadi pada episode 400 - 405 di arc Kepulauan Sabaody, di mana *Tenryuubito* (Bangsawan Dunia) menjalankan perdagangan dan perbudakan terhadap manusia ikan. Manusia ikan, yang dianggap sebagai ras yang lebih rendah oleh sebagian besar manusia, dijual sebagai budak dan dipaksa untuk menanggung kehidupan yang penuh penderitaan dan penganiayaan. Mereka dianggap sebagai komoditas yang dapat dibeli, dijual, dan dieksploitasi untuk keuntungan pihak yang lebih kuat, baik secara fisik maupun finansial.¹⁰⁵ Perbudakan rasial ini juga menggambarkan bagaimana dalam

¹⁰⁴ Retna Dwi Estuningtyas. 2018. *Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya*. Al-Munzir, Edisi 11.2. Halaman 195-218.

¹⁰⁵ Tri Utari Octavia Fajri Jayanti. 2020. *Representasi Maskulinitas Pada Tokoh Utama Anime One Piece*. Diss. Kodept043131# Sekolahtinggibahasaasingjia.

hubungan internasional, kelompok-kelompok tertentu bisa dipandang sebagai "komoditas" yang dieksploitasi demi keuntungan politik dan ekonomi negara-negara besar yang memiliki kontrol lebih besar atas pasar dan sumber daya global.

Tenryuubito, sekelompok elit yang sangat kaya dan berkuasa, menggunakan posisi mereka untuk mengatur kehidupan para budak, termasuk para manusia ikan, yang mereka anggap tidak lebih dari sekedar properti pribadi. Dengan adanya hal tersebut, *One Piece* melambangkan perbudakan rasial, yang secara fisik dan mental menghancurkan mereka yang terjebak di dalamnya. Para budak ini dilucuti dari identitas dan kebebasan mereka, dan dipaksa untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan, yang mencerminkan perbudakan di dunia nyata, di mana orang-orang diperjualbelikan tanpa mempedulikan kemanusiaan mereka. Dalam kerangka hubungan internasional, ini menunjukkan bagaimana ketidakadilan dan diskriminasi rasial di tingkat global dapat mempengaruhi kebijakan negara-negara, mengarah pada marginalisasi kelompok-kelompok tertentu yang terpinggirkan dari kekuasaan dan kesempatan.¹⁰⁶

Selain perbudakan fisik, *One Piece* juga membahas tentang adanya perbudakan mental, dimana para korban tidak hanya dipaksa untuk bekerja

¹⁰⁶ Nur Isa Dessi, Sufirman Rahman, dan Abdul Qahar. 2024. *Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Edisi 5.2. Halaman 515-530.

tanpa batas waktu, tetapi juga harus mengakui bahwa mereka tidak memiliki pengaruh atas nasib mereka. Salah satu contoh perbudakan mental yang menonjol adalah kisah Kuma, mantan bajak laut yang terkenal karena kekuatan dan kemampuannya. Namun, setelah dibujuk oleh Pemerintah Dunia, Kuma diubah menjadi alat militer tanpa emosi, kemudian menjadi *cyborg* yang dikendalikan oleh kelompok yang lebih kuat. Sebagai seorang *Shichibukai*, dia dilucuti dari kebebasannya dan dipaksa untuk mematuhi perintah, tidak peduli seberapa berat pengorbanannya. Kuma menjadi simbol mengerikan bagi seseorang yang tidak hanya kehilangan kemampuan fisiknya, tetapi juga kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan masa depannya sendiri.¹⁰⁷ Transformasi Kuma ini mengingatkan kita pada konsep perbudakan mental yang terjadi dalam skala internasional, di mana negara-negara kuat dapat mengubah peran negara-negara kecil menjadi alat atau pion dalam agenda politik dan ekonomi mereka.

Transisi ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat kehilangan identitasnya dalam sistem perbudakan yang merendahkan martabatnya baik secara fisik maupun mental. Contoh menarik lainnya adalah kisah *Cyborg* Franky, yang dipaksa bekerja di dunia bawah yang kejam dan korup. Franky adalah karakter yang sangat kuat dan brilian dalam hal pembuatan senjata dan teknologi, namun ia dipaksa untuk hidup sebagai budak, membuat senjata untuk para penjahat dan pedagang gelap. Dihadapkan dengan

¹⁰⁷ *Ibid.*,

ancaman dan manipulasi, Franky kehilangan kemampuannya untuk bekerja demi kepentingannya sendiri dan dipaksa untuk melayani kepentingan individu yang lebih kuat dan kejam.¹⁰⁸ Kisah Franky mencontohkan eksploitasi individu berdasarkan keterampilan dan bakat mereka, di mana seseorang dengan potensi besar dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang menyedihkan demi keuntungan mereka yang tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Keadaan ini mencontohkan bagaimana sistem ketidakadilan dapat mengeksploitasi individu dengan menyangkal kemampuan mereka untuk memilih pekerjaan atau tujuan hidup mereka, memaksa mereka bekerja untuk orang lain tanpa kompensasi yang sesuai. Hal ini dapat dianalogikan dengan sistem internasional di mana negara-negara besar mengandalkan negara-negara kecil untuk menghasilkan keuntungan tanpa memberikan imbalan yang adil bagi pihak yang terlibat, memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi global.

One Piece tidak hanya menampilkan perbudakan sebagai sistem yang kejam dan tidak manusiawi, tetapi juga menggunakan perbudakan untuk mengkritik struktur masyarakat saat ini. Dalam beberapa cerita, karakter-karakter yang diperbudak seperti Shirley, Franky, dan Kuma menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan sistem yang mengeksploitasi mereka. Mereka adalah korban dari sistem yang tidak adil, namun jalan mereka menunjukkan bagaimana seseorang dapat menemukan

¹⁰⁸ Hansen Liu, dan Septia Winduwati. 2023. *Representasi Persahabatan dalam Anime One Piece Episode of Merry*. Koneksi 7.2. Halaman 409-416.

kekuatan mereka dan berjuang untuk kebebasan bahkan setelah sangat menderita. *One Piece* menggambarkan perbudakan dan eksploitasi dengan berbagai cara, menekankan dampak bencana dari sistem perbudakan terhadap para korbannya secara fisik, intelektual, dan sosial. Melalui karakter-karakter ini, *One Piece* menggambarkan bagaimana perlawanan terhadap sistem yang menindas, baik dalam konteks lokal maupun internasional, dapat memicu perubahan besar yang mendorong keadilan dan kebebasan.¹⁰⁹

Perbudakan tidak hanya menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan sistemik yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika sistem seperti itu dipertahankan, individu yang terjebak di dalamnya kehilangan kemampuan untuk memilih masa depan mereka sendiri dan diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana ketidaksetaraan dalam hubungan internasional dapat merugikan negara-negara yang lebih lemah, dengan memaksa mereka untuk tunduk pada kepentingan negara-negara besar tanpa mendapatkan manfaat yang setara.

Isu perbudakan di *One Piece*, khususnya interaksi antara *Tenryuubito* dengan mereka yang diperbudak, Pemerintah Dunia, dan karakter-karakter seperti Kuma dan Franky, memberikan pesan yang sangat

¹⁰⁹ Idi Subandy Ibrahim, dan Bachruddin Ali Akhmad. 2014. *Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

dalam tentang nilai kebebasan dan martabat manusia.¹¹⁰ *One Piece* tidak hanya menggambarkan perbudakan fisik yang mengerikan, tetapi juga konsekuensi psikologis dan sosialnya, serta bagaimana sistem perbudakan ini didasarkan pada kerangka kerja masyarakat yang tidak adil. Kritik terhadap perbudakan ini juga dapat diterapkan pada isu-isu ketidakadilan dan eksploitasi saat ini, di mana orang-orang dan kelompok tertentu terus menerus ditindas, sementara struktur kekuasaan yang ada mempertahankan status quo untuk keuntungan mereka sendiri.



¹¹⁰ M Izharuddin. 2018. *Perwujudan Giri Dan Ninjou Yang Tercermin Dalam Persahabatan Tokoh Utama Luffy Dan Bentham Pada Anime One Piece Karya Eiichiro Oda (Kajian Antropologi Sastra) 栄一路尾田のアニメ [ワンピース] における主人公のルフィとベンタムの友情関係に反映された義理と人情の顕現*. Diss. Diponegoro University.